

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Dengan Moderasi Gender Diversity

Cindy Laurensia^{1*}, Haryono², Ira Grania Mustika³

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Universitas Tanjungpura

¹laurensiacindy997@gmail.com, ²haryono@untan.ac.id, ³igraniamustika@yahoo.co.id

***Cindy Laurensia**

Abstrak

Pendekatan kuantitatif diadopsi dalam penelitian ini untuk meneliti pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023 dengan moderasi *gender diversity*. Melalui metode *purposive sampling* diperoleh 44 perusahaan yang memenuhi kriteria selama 3 tahun pengamatan sehingga terdapat 132 data observasi. Metode analisis regresi linier berganda dan analisis regresi moderasi digunakan di dalam penelitian ini dengan alat bantu SPSS 25. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diproyeksikan oleh ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada *tax avoidance*, sedangkan kompensasi eksekutif menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, *gender diversity* tidak terbukti memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: *Gender Diversity, Good Corporate Governance, Tax Avoidance.*

Abstract

A quantitative approach was adopted in this study to examine the influence of good corporate governance on tax avoidance in consumer cyclicals companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2021-2023 with gender diversity as moderation. Through purposive sampling, 44 companies that met the criteria were selected for a three-year observation period, resulting in 132 data observations. The analysis method used in this study are multiple linear regression analysis and moderated regression analysis by using SPSS 25. The findings of this study indicate that good corporate governance, proxied by the size of board of directors, independent commissioners, and audit committees, does not have a significant impact on tax avoidance, while executive compensation shows a significant positive influence on tax avoidance. Meanwhile, gender diversity was not able to moderate the influence of good corporate governance on tax avoidance.

Kata kunci: *Gender Diversity, Good Corporate Governance, Tax Avoidance.*

PENDAHULUAN

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib bersifat memaksa kepada negara yang diatur dalam peraturan perundangan, di mana subjek pajak tidak memperoleh manfaat langsung yang sebanding dengan jumlah pajak yang dibayarkan (Yunita et al., 2022). Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang krusial. Upaya optimalisasi penerimaan pajak secara konsisten dilakukan melalui reformasi perpajakan yang komprehensif. Namun, rendahnya rasio pajak di Indonesia mengindikasikan adanya potensi penerimaan pajak yang belum terealisasi secara optimal (Mustika et al., 2023). Kewajiban pajak merupakan konsekuensi logis bagi entitas bisnis (Dewi & Gunawan, 2019) dan merupakan komponen biaya yang secara signifikan mempengaruhi profitabilitas entitas bisnis tersebut. Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan, entitas bisnis cenderung melakukan optimalisasi struktur perpajakan untuk meminimalisir beban fiskal. Praktik manajemen pajak yang proaktif merupakan upaya strategis untuk mencapai efisiensi pajak (Lestari & Ovami, 2020). Fenomena optimalisasi pajak dengan praktik *tax avoidance* sebagai upaya strategis untuk mengurangi beban pajak, telah menjadi topik yang menarik perhatian para akademisi di bidang ekonomi dan keuangan (Kartikasari et al., 2023). Praktik *tax avoidance* merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia (Zudana et al., 2021) dan semakin meluas dari tahun ke tahun (Maraya & Yendrawati, 2016). *Tax Justice Network* mengungkap peningkatan yang mengkhawatirkan dalam praktik *tax avoidance*, terutama oleh perusahaan multinasional dengan potensi kerugian pendapatan negara akibat praktik ini telah meningkat sebesar 40% (Oktaviani et al., 2023). Fakta bahwa *tax avoidance* menjadi agenda utama dalam pertemuan G20 di India semakin menguatkan argumen bahwa masalah ini telah menjadi perhatian global (Indonesia.go.id, 2023).

Terdapat korelasi yang kuat antara kualitas tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dengan tingkat *tax avoidance*. Peningkatan kualitas tata kelola perusahaan merupakan langkah strategis untuk menekan praktik *tax avoidance* (Chandra & Cintya, 2021), pernyataan tersebut didukung dengan temuan serupa dari penelitian (Sandy & Lukviarman, 2015). Namun temuan dari penelitian (Guska & Kaesang, 2024) menyatakan bahwa semakin berkualitas *good corporate governance* maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* perusahaan tersebut. Di sisi lain, penelitian dari (Hudha & Utomo, 2021) tidak berhasil menemukan korelasi yang signifikan antara *good corporate governance* dengan *tax avoidance*.

Kehadiran perempuan dalam berbagai posisi kepemimpinan perusahaan menunjukkan bagaimana *gender diversity* dapat mengubah lanskap *good corporate governance* (Vacca et al., 2020). Representasi perempuan dalam jajaran eksekutif perusahaan telah menjadi perhatian utama di tingkat internasional. Dinamika gender dalam industri akuntansi masih merupakan bidang penelitian yang “belum banyak diteliti” (Chang et al., 2019). Temuan dari penelitian (Chang et al., 2019) di China menyimpulkan bahwa keberadaan perempuan turut ikut andil dalam mendorong praktik *tax avoidance*, namun penelitian dari (Zhang et al., 2022) di Pakistan tidak menemukan pengaruh signifikan dari keberadaan perempuan pada potensi praktik *tax avoidance* perusahaan. Sementara itu, penelitian dari (Anggraeni & Kurnianto, 2020) menunjukkan bukti empiris bahwa keberadaan perempuan di dalam jajaran eksekutif perusahaan dapat menurunkan potensi keterjadian praktik *tax avoidance*, yang

kemudian pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian dari (Hudha & Utomo, 2021).

Melihat dari ketidakkonsistenan hasil penelitian diatas, penulis menaruh minat untuk menggali lebih dalam pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* di Indonesia pada periode 2021-2023 serta mengeksplorasi peran *gender diversity* dalam memoderasi hubungan antara *good corporate governance* dengan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Konsep teori agensi menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen) di mana prinsipal mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen, namun seringkali terjadi perbedaan tujuan di antara keduanya (Chandra & Saputra, 2024). Adanya praktik *tax avoidance* yang agresif oleh perusahaan tidak selalu sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham, di mana manajer sebagai agen mungkin memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan pribadi melalui praktik-praktik yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi pemilik perusahaan. Fenomena ini merefleksikan permasalahan agensi yang klasik, di mana terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen) perusahaan (Zhang et al., 2022).

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Sandy & Lukviarman, 2015). Tindakan ini dianggap legal karena tidak secara langsung melanggar hukum pajak namun berisiko tinggi karena berpotensi memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Di satu sisi, perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya, namun di sisi lain, perusahaan juga menghadapi risiko sanksi dan kerusakan reputasi yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Hudha & Utomo, 2021).

Good Corporate Governance

Good corporate governance mengatur hubungan antar pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti pemegang saham, direksi, dan komisaris serta bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan yang sering terjadi ketika manajer lebih mementingkan kepentingan pribadi atau jangka pendek, daripada kepentingan jangka panjang perusahaan dan pemegang saham (Julianty, 2017). Ada lima pilar penting dalam *good corporate governance*; yakni keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan (Anggraeni & Kurnianto, 2020). Keberadaan *good corporate governance* dapat membantu mencegah perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* yang agresif, yang pada akhirnya dapat merugikan investor (Oktavia, 2020).

Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi perusahaan terdiri dari anggota-anggota dengan pengalaman, nilai-nilai, dan keterampilan yang beragam. Mereka bertanggung jawab untuk menentukan arah strategis perusahaan dan tingkat transparansi informasi kinerja perusahaan (Vacca et al., 2020). Besarnya dewan direksi dapat memengaruhi keputusan strategis perusahaan maka dari itu jumlah anggota dewan harus ditentukan dengan optimal (Anggraeni & Kurnianto, 2020).

Komisaris Independen

Komisaris independen, sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan, berperan sebagai pengawas eksternal yang netral dan tidak memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan (Dosinta et al., 2022). Proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris dapat mempengaruhi kualitas pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya *fraud* oleh manajemen perusahaan (Dewi & Gunawan, 2019).

Komite Audit (KMA)

Komite audit adalah mekanisme pengawasan yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan bertujuan untuk membantu komisaris independen dalam meningkatkan fungsi pengawasan dalam pengendalian internal manajemen, kepatuhan perusahaan, dan laporan keuangan yang wajar, relevan serta andal (Budi, 2019; Dewi & Gunawan, 2019; Febriansyah & Oktafiani, 2021).

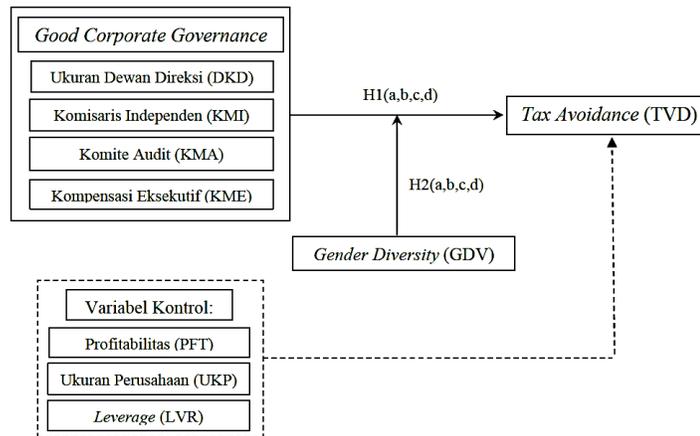
Kompensasi Eksekutif (KME)

Kompensasi eksekutif merujuk pada keseluruhan imbalan yang diterima oleh para eksekutif tingkat tinggi sebagai penghargaan atas kontribusi mereka untuk memastikan komitmen mereka terhadap perusahaan (Fatimah et al., 2017). Gaji, tunjangan, dan bonus adalah beberapa bentuk kompensasi yang diberikan kepada manajemen (Asih & Setiawan, 2022.).

Gender Diversity (GDV)

Keberadaan perempuan di dewan sering dianggap sebagai indikator *gender diversity* (Salsabilla et al., 2024). Kehadiran perempuan dalam struktur kepemimpinan perusahaan berkorelasi positif dengan tata kelola perusahaan, memastikan keputusan dibuat secara etis dan strategis, meningkatkan efisiensi keuangan, meningkatkan tingkat transparansi informasi serta praktik akuntansi yang lebih konservatif (Chang et al., 2019; Vacca et al., 2020). Perempuan lebih bersifat proaktif, terlibat, dan teliti, berkontribusi pada dinamika diskusi yang produktif dan harmonis, lebih patuh pada regulasi, dan cenderung lebih menghindari risiko dalam mengambil keputusan strategis dan operasional (Dosinta et al., 2022; Chang et al., 2019).

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis yang dihasilkan berdasarkan kerangka konseptual diatas meliputi:

- H1a : Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H1b : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H1c : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H1d : Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- H2a : *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap *tax avoidance*.
- H2b : *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- H2c : *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*.
- H2d : *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui teknik observasi non-partisipan dengan data sekunder berupa laporan tahunan yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini membatasi populasi pada 153 perusahaan yang terklasifikasi dalam sektor *consumer cyclicals* yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Teknik *purposive sampling* diterapkan untuk memilih sampel yang relevan dengan kriteria pemilihan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2023.	153
2	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang <i>suspend</i> atau <i>delisting</i>	(10)
3	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang tidak menyajikan laporan tahunan secara lengkap selama periode 2021-2023.	(25)

4	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang tidak membukukan laba positif selama periode 2021-2023.	(68)
5	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang tidak menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan mata uang Rupiah selama periode 2021-2023.	(5)
6	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang tidak menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2021-2023.	0
7	Perusahaan sektor <i>consumer cyclicals</i> yang tidak menyediakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara lengkap selama periode 2021-2023.	(1)
Jumlah Sampel		44
Tahun Observasi		3
Total Data Observasi		132

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel dalam penelitian ini telah didefinisikan secara operasional dan diukur dengan metode seperti yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
Variabel Dependen			
1	Tax Avoidance (TVD)	<i>Tax avoidance</i> memanfaatkan celah-celah hukum secara legal sesuai dengan undang-undang perpajakan dan pengukurannya menggunakan metrik perbandingan antara beban pajak dengan laba sebelum pajak (Oktaviani et al., 2023).	$ETR = \frac{Tax\ Expense}{Pretax\ Income}$
Variabel Independen			
1	Ukuran Dewan Direksi (DKD)	Jumlah anggota dewan direksi pada akhir tahun buku menjadi patokan dalam mengukur ukuran dewan direksi suatu perusahaan (Chandra & Saputra, 2024).	$DKD = \Sigma \text{ Anggota Dewan Direksi}$
2	Komisaris Independen (KMI)	Pengukuran proporsi komisaris independen menggunakan skala rasio dengan membandingkan jumlah komisaris independen terhadap total jumlah anggota dewan komisaris (Santoso, 2014).	$KMI = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$
3	Komite Audit (KMA)	Ukuran komite audit dapat diukur melalui kuantifikasi jumlah anggota komite yang tercatat pada akhir periode pelaporan keuangan perusahaan (Julianty, 2017).	$KMA = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit}$
4	Kompensasi Eksekutif (KME)	Kompensasi eksekutif diukur menggunakan total kompensasi yang diterima oleh dewan komisaris dan direksi dalam satu tahun dan diubah menjadi logaritma natural (Santoso, 2014).	$KME = Ln (\text{Total Kompensasi Eksekutif})$
Variabel Moderasi			
1	Gender Diversity (GDV)	<i>Gender diversity</i> diukur berdasarkan proporsi perempuan di antara anggota dewan direksi dan komisaris (Ambarsari et al., 2018).	$GDV = \frac{\text{Jumlah Perempuan pada Dewan}}{\text{Jumlah Dewan Direksi} + \text{Dewan Komisaris}}$
Variabel Kontrol			
1	Profitabilitas (PFT)	<i>Return on Assets (ROA)</i> menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. (Julianty, 2017).	$PFT = \frac{Net\ profit}{Total\ Assets}$

2	Ukuran Perusahaan (UKP)	Nilai logaritma natural dari total aset perusahaan digunakan sebagai variabel proksi untuk mengukur ukuran perusahaan (Febriansyah & Oktafiani, 2021).	UKP = Ln (<i>Total Assets</i>)
3	<i>Leverage</i> (LVR)	<i>Leverage</i> mencerminkan proporsi pembiayaan perusahaan yang bersumber dari utang terhadap modal sendiri (Ambarsari et al., 2018).	LVR = $\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$

Dalam penelitian ini, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berperan sebagai variabel kontrol untuk menguji ketahanan (*robustness test*) pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* sehingga didapati temuan yang lebih akurat dan spesifik.

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan proses komputasi data dibantu oleh perangkat lunak SPSS versi 25. Untuk memastikan keabsahan hasil analisis, dilakukan serangkaian uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Data yang memenuhi seluruh asumsi tersebut kemudian diuji secara statistik menggunakan uji analisis regresi linier berganda, uji analisis regresi moderasi, uji koefisien determinasi, uji F dan uji T. Terdapat dua model regresi yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Model 1:

$$\text{TVD} = \alpha + \beta_1\text{DKD} + \beta_2\text{KMI} + \beta_3\text{KMA} + \beta_4\text{KME} + \beta_5\text{GDV} + \beta_6\text{PFT} + \beta_7\text{UKP} + \beta_8\text{LVR} + \varepsilon$$

Model 2:

$$\text{TVD} = \alpha + \beta_1\text{DKD} + \beta_2\text{KMI} + \beta_3\text{KMA} + \beta_4\text{KME} + \beta_5\text{GDV} + \beta_6\text{PFT} + \beta_7\text{UKP} + \beta_8\text{LVR} + \beta_9\text{DKD}*\text{GDV} + \beta_{10}\text{KMI}*\text{GDV} + \beta_{11}\text{KMA}*\text{GDV} + \beta_{12}\text{KME}*\text{GDV} + \varepsilon$$

Keterangan:

TVD	= <i>Tax Avoidance</i>
α	= Konstanta
$\beta_1... \beta_{12}$	= Koefisien Regresi Parsial
DKD	= Ukuran Dewan Direksi
KMI	= Komisaris Independen
KMA	= Komite Audit
KME	= Kompensasi Eksekutif
GDV	= <i>Gender Diversity</i>
PFT	= Profitabilitas
UKP	= Ukuran Perusahaan
LVR	= <i>Leverage</i>
*	= Interaksi
ε	= <i>Error</i>

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Tabel Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Jenis Pengujian		Hasil Pengujian
Uji Normalitas		
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.084
Uji Multikolinearitas		
DKD	VIF	2.199
	Tolerance	0.455
KMI	VIF	1.086
	Tolerance	0.921
KMA	VIF	1.085
	Tolerance	0.921
KME	VIF	2.229
	Tolerance	0.449
GDV	VIF	1.224
	Tolerance	0.817
PFT	VIF	1.272
	Tolerance	0.786
UKP	VIF	3.024
	Tolerance	0.331
LVR	VIF	1.060
	Tolerance	0.943
Uji Heteroskedastisitas		
DKD	Sig	0.824
KMI	Sig	0.971
KMA	Sig	0.093
KME	Sig	0.995
GDV	Sig	0.263
PFT	Sig	0.098
UKP	Sig	0.813
LVR	Sig	0.461
Uji Autokorelasi		
Durbin-Watson		1.964

Sumber: Data sekunder diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian normalitas, nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0.084, yakni lebih besar dari taraf signifikansi 0.05, temuan ini mengindikasikan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Menilik dari hasil pengujian multikolinearitas, semua variabel di dalam penelitian ini memiliki nilai toleransi yang melebihi ambang batas 0.1 dengan nilai VIF kurang dari 10, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga model regresi yang dikembangkan layak untuk diinterpretasikan. Dengan nilai sig yang melebihi angka 0.05 pada masing-masing variabel, maka bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Pada pengujian autokorelasi, nilai Durbin-Watson yang diperoleh

adalah sebesar 1.964. Apabila nilai Durbin-Watson (dW) terletak di antara nilai batas atas (dU) dan (4-dU), kita dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data. Nilai dW 1.964 di dalam penelitian ini terbukti lebih besar dari dU yang sebesar 1.8477 dan lebih kecil dari nilai 4-dU yang sebesar 2.1523 sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Model 1
Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3. Tabel Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda (Model 1)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.356	.263		1.353	.179
	DKD	.002	.009	.030	.234	.815
	KMI	.147	.087	.151	1.683	.096
	KMA	-.023	.070	-.030	-.335	.739
	KME	.031	.010	.417	3.257	.002
	PFT	-.716	.252	-.275	-2.842	.005
	UKP	-.032	.010	-.490	-3.279	.001
	LVR	.057	.021	.237	2.683	.009
	GDV	-.073	.064	-.109	-1.146	.255

a. Dependent Variable: TVD

Model regresi yang terbentuk berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas adalah:

$$TVD = 0.356 + 0.002DKD + 0.147KMI - 0.023KMA + 0.031KME - 0.073GDV - 0.716PFT - 0.032UKP + 0.057LVR + \epsilon$$

Berdasarkan persamaan di atas, dengan asumsi ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, *gender diversity*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* tetap atau sama dengan nol, maka *tax avoidance* akan mengalami peningkatan sebesar 0.356. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif memiliki makna bahwa setiap peningkatan yang terjadi akan mengakibatkan peningkatan pada *tax avoidance* sebesar nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel. Dengan kata lain, *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.002 untuk setiap pertambahan ukuran dewan direksi, sebesar 0.147 untuk setiap peningkatan komposisi komisaris independen, sebesar 0.031 untuk setiap pertambahan kompensasi eksekutif, dan sebesar 0.057 untuk setiap peningkatan *leverage*. Di lain sisi, nilai koefisien regresi yang bernilai negatif memiliki makna sebaliknya, sehingga bisa disimpulkan bahwa *tax avoidance* akan mengalami penurunan setiap peningkatan yang terjadi pada masing-masing variabel. *Tax avoidance* akan menurun sebesar 0.023 untuk setiap peningkatan komite audit, sebesar 0.073 untuk setiap peningkatan *gender diversity*, sebesar 0.716 untuk setiap peningkatan profitabilitas, dan sebesar 0.032 untuk setiap peningkatan pada ukuran perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4. Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (Model 1)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.527 ^a	.277	.218	.08718

a. Predictors: (Constant), GDV, KME, KMI, LVR, KMA, PFT, DKD, UKP

Berdasarkan hasil output pengujian koefisien determinasi, nilai R-Square menunjukkan angka 0.277 atau 27.7%; sehingga bisa disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, *gender diversity*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* mempengaruhi *tax avoidance* sebesar 27,7%, dengan 72.3% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji F

Tabel 5. Tabel Hasil Uji F (Model 1)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.286	8	.036	4.704	.000 ^b
	Residual	.745	98	.008		
	Total	1.031	106			

a. Dependent Variable: TVD
 b. Predictors: (Constant), GDV, KME, KMI, LVR, KMA, PFT, DKD, UKP

Dari hasil pengujian diatas diperoleh nilai signifikansi 0.000 atau kurang dari 0.05, sehingga bisa disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, *gender diversity*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan mempengaruhi *tax avoidance*.

Uji T

Tabel 6. Tabel Hasil Uji T (Model 1)

Variabel	T-hitung	Sig	Keterangan
DKD	.234	.815	Tidak Berpengaruh
KMI	1.683	.096	Tidak Berpengaruh
KMA	-.335	.739	Tidak Berpengaruh
KME	3.257	.002	Berpengaruh Signifikan
PFT	-2.842	.005	Berpengaruh Signifikan
UKP	-3.279	.001	Berpengaruh Signifikan
LVR	2.683	.009	Berpengaruh Signifikan
GDV	-1.146	.255	Tidak Berpengaruh

Nilai signifikansi kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa suatu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, berdasarkan hasil output uji T maka bisa disimpulkan bahwa kompensasi eksekutif, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran dewan

direksi, komisaris independen, komite audit, dan *gender diversity* tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Model 2

Uji Analisis Regresi Moderasi

Tabel 7. Tabel Hasil Pengujian Analisis Regresi Moderasi (Model 2)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.295	.390		.756	.452
	DKD	.004	.012	.055	.306	.761
	KMI	.305	.155	.312	1.960	.053
	KMA	-.038	.106	-.049	-.358	.721
	KME	.035	.017	.464	2.048	.043
	PFT	-.773	.261	-.297	-2.961	.004
	UKP	-.033	.010	-.507	-3.194	.002
	LVR	.056	.022	.232	2.535	.013
	GDV	.258	3.447	.386	.075	.940
	DKD*GDV	-.002	.037	-.014	-.053	.958
	KMI*GDV	-.954	.759	-.559	-1.257	.212
	KMA*GDV	-.028	1.288	-.104	-.022	.983
	KME*GDV	.004	.054	.116	.076	.940

a. Dependent Variable: TVD

Berdasarkan output dari pengujian analisis regresi moderasi, didapatkanlah persamaan sebagai berikut:

$$TVD = 0.295 + 0.004DKD + 0.305KMI - 0.038KMA + 0.035KME + 0.258GDV - 0.773PFT - 0.033UKP + 0.056LVR - 0.002DKD*GDV - 0.954KMI*GDV - 0.028KMA*GDV + 0.004KME*GDV + \epsilon$$

Meninjau dari persamaan diatas, *tax avoidance* akan meningkat sebesar 0.295 setelah moderasi *gender diversity* dengan asumsi bahwa ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, *gender diversity*, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* bernilai tetap atau sama dengan nol. Kemudian *tax avoidance* mengalami peningkatan sebesar 0.004 untuk setiap penambahan ukuran dewan direksi, sebesar 0.305 untuk peningkatan komisaris independen, sebesar 0.035 untuk setiap penambahan kompensasi eksekutif dan sebesar 0.056 untuk setiap peningkatan pada *leverage* setelah adanya moderasi dari *gender diversity*. Di sisi lain, *tax avoidance* akan mengalami penurunan sebesar 0.038 untuk setiap penambahan komite audit, sebesar 0.773 untuk setiap peningkatan profitabilitas, dan sebesar 0.033 untuk setiap penambahan ukuran perusahaan setelah dimoderasi oleh *gender diversity*.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (Model 2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.538 ^a	.290	.199	.08826

a. Predictors: (Constant), KME*GDV, LVR, KME, KMI, KMA, PFT, DKD, UKP, DKD*GDV, KMI*GDV, KMA*GDV, GDV

Hasil output dari pengujian koefisien determinasi menunjukkan nilai R-square sebesar 0.290 atau 29% sehingga bisa disimpulkan bahwa setelah adanya moderasi dari *gender diversity*, variabel ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* memiliki pengaruh sebesar 29% terhadap *tax avoidance* dengan 71% dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji F

Tabel 9. Tabel Hasil Uji F (Model 2)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.299	12	.025	3.194	.001 ^b
	Residual	.732	94	.008		
	Total	1.031	106			

a. Dependent Variable: TVD
 b. Predictors: (Constant), KME*GDV, LVG, KME, KMI, KMA, PFT, DKD, UKP, DKD*GDV, KMI*GDV, KMA*GDV, GDV

Output pengujian F menunjukkan nilai signifikansi 0.001 atau kurang dari 0.05, sehingga bisa disimpulkan bahwa setelah dimoderasi oleh *gender diversity*, baik ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kompensasi eksekutif, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan masih berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Uji T

Tabel 10. Tabel Hasil Uji T (Model 2)

Variabel	T-hitung	Sig	Keterangan
DKD	.306	.761	Tidak Berpengaruh
KMI	1.960	.053	Tidak Berpengaruh
KMA	-.358	.721	Tidak Berpengaruh
KME	2.048	.043	Berpengaruh Signifikan
PFT	-2.961	.004	Berpengaruh Signifikan
UKP	-3.194	.002	Berpengaruh Signifikan
LVR	2.535	.013	Berpengaruh Signifikan
GDV	.075	.940	Tidak Berpengaruh
DKD*GDV	-.053	.958	Tidak Mampu Memoderasi

KMI*GDV	-1.257	.212	Tidak Mampu Memoderasi
KMA*GDV	-.022	.983	Tidak Mampu Memoderasi
KME*GDV	.076	.940	Tidak Mampu Memoderasi

Dengan mengacu pada ketentuan nilai signifikansi kurang dari 0.05, maka bisa disimpulkan bahwa setelah adanya moderasi dari *gender diversity*, variabel ukuran dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit tidak menunjukkan pengaruh terhadap *tax avoidance*; sedangkan kompensasi eksekutif, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Kemudian berdasarkan hasil uji T diatas dengan signifikansi diatas 0.05, maka dapat disimpulkan juga bahwa *gender diversity* tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.

PEMBAHASAN

H1a: Ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian dari model 1 dengan nilai signifikansi 0.815 dan model 2 dengan nilai signifikansi 0.761 menunjukkan angka diatas 0.05, sehingga bisa disimpulkan bahwa jumlah anggota dewan direksi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Hudha & Utomo (2021), dan Chandra & Saputra (2024), namun tidak mendukung penelitian Anggraeni & Kurnianto (2020) dan Hoseini, et al (2019) yang berhasil membuktikan bahwa jumlah anggota dewan direksi tidak serta merta menjamin penurunan praktik *tax avoidance* tetapi dapat memperkuat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, sehingga mendorong perilaku oportunistik seperti *tax avoidance*.

Karakteristik perusahaan sektor *consumer cyclicals* yang sensitif terhadap kondisi ekonomi membuatnya cenderung berfokus pada upaya mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar serta menjaga tingkat profitabilitas selama fluktuasi ekonomi. Akibatnya, dewan direksi cenderung lebih terfokus pada strategi bisnis yang dapat meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya, terutama jika berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, hal ini kemudian seringkali menggeser perhatian dari inisiatif penghematan pajak yang bersifat jangka panjang.

H1b: Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Nilai signifikansi pada model 1 adalah sebesar 0.096 sedangkan pada model 2 adalah sebesar 0.053, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hudha & Utomo (2021), Oktavia (2020), dan Kasih, et al (2023) yang berpendapat bahwa wewenang dewan komisaris independen dibatasi pada pengawasan dan pemberian nasihat sehingga tidak memiliki otoritas untuk mengintervensi keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh manajemen.

Sektor *consumer cyclicals*, dengan karakteristiknya yang sensitif terhadap fluktuasi ekonomi dan perubahan permintaan konsumen, cenderung memprioritaskan strategi pertumbuhan jangka pendek. Komisaris independen dalam sektor ini, meski

memiliki peran pengawasan, seringkali terkendala oleh tekanan untuk mencapai kinerja jangka pendek serta keterbatasan akses terhadap informasi detail terkait perencanaan pajak. Akibatnya, pengawasan terhadap praktik perpajakan dan pencegahan *tax avoidance* dalam sektor *consumer cyclicals* mungkin tidak seoptimal di sektor lain, terutama mengingat kompleksitas isu perpajakan dan dominasi manajemen dalam pengambilan keputusan terkait pajak.

H1c: Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai signifikansi untuk variabel komite audit adalah sebesar 0.739 pada model 1 dan sebesar 0.721 pada model 2, hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit tidak efektif dalam mencegah atau mengurangi praktik *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Kasih, et al (2023) yang berargumen bahwa komite audit membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak dalam perusahaan agar dapat berfungsi secara efektif, jika tanpa dukungan yang memadai, komite audit tidak dapat menjamin pencegahan praktik *tax avoidance*. Sementara itu Febriansyah & Oktafiani (2021) menemukan bukti bahwa semakin besar proporsi komite audit akan berdampak pada semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*, terutama jika perusahaan memiliki komite audit yang berkompetensi di bidang akuntansi.

Fokus utama perusahaan *consumer cyclicals* pada pertumbuhan jangka pendek membuat komite audit cenderung memprioritaskan pengawasan terhadap aspek-aspek yang langsung berdampak pada kinerja keuangan, seperti laporan keuangan dan efisiensi operasional. Meskipun komite audit memiliki peran dalam kepatuhan regulasi, praktik *tax avoidance* yang legal mungkin tidak menjadi perhatian utama, terutama jika tidak dianggap sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas keuangan jangka pendek. Akibatnya, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan strategi pajak seringkali menjadi tanggung jawab langsung manajemen.

H1d: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian pada model 1 menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0.002 sedangkan pada model 2 nilai signifikansinya sebesar 0.043 dengan koefisien regresi positif, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peningkatan kompensasi eksekutif secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Fatimah, et al (2017) serta Putri & Setiawati (2021), namun berbeda dengan hasil penelitian dari Hudha & Utomo (2021) yang tidak menemukan adanya bukti empiris bahwa pemberian kompensasi pada eksekutif berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Teori keagenan memberikan kerangka teoritis untuk memahami hubungan antara kompensasi eksekutif dan *tax avoidance*. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dapat diatasi melalui desain mekanisme insentif yang tepat. Dalam konteks ini, kompensasi eksekutif yang didesain untuk menyelaraskan tujuan antara pemilik dan manajer dapat mendorong perilaku *tax avoidance* karena manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan nilai perusahaan, termasuk penghematan pajak melalui praktik *tax avoidance* (Fatimah et al., 2017). Dalam konteks persaingan yang ketat di sektor *consumer cyclicals*, praktik *tax avoidance* yang legal sering kali diintegrasikan ke dalam strategi pengelolaan pajak perusahaan sebagai upaya untuk memaksimalkan

keuntungan. Tekanan untuk mencapai target kinerja keuangan yang ambisius dapat mendorong eksekutif untuk mengeksploitasi celah-celah perpajakan yang ada. Hal ini diperkuat oleh sistem remunerasi yang seringkali menghubungkan kompensasi eksekutif dengan kinerja keuangan perusahaan.

H2a: *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara ukuran dewan direksi terhadap *tax avoidance*.

Nilai signifikansi 0.958 menunjukkan angka diatas 0.05, hal ini mengindikasikan bahwa *gender diversity* tidak terbukti mampu untuk memoderasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap *tax avoidance*, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kehadiran perempuan di dalam dewan direksi tidak mampu mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hoseini, et al (2019) yang membuktikan bahwa kehadiran perempuan dalam struktur kepemimpinan perusahaan, sebagaimana tercermin dalam komposisi dewan direksi, berkontribusi signifikan dalam mengurangi praktik *tax avoidance*.

Gender diversity dalam dewan direksi tidak serta-merta mengimplikasikan penurunan praktik *tax avoidance* di sektor *consumer cyclicals*. Meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih berorientasi pada kepentingan jangka panjang, namun dalam konteks persaingan yang ketat di sektor *consumer cyclicals* yang sensitif terhadap stabilitas ekonomi, tekanan untuk mencapai kinerja keuangan yang tinggi dapat mengaburkan perbedaan gender dalam pengambilan keputusan terkait perpajakan.

H2b: *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian dengan nilai signifikansi 0.212 mengindikasikan bahwa *gender diversity* tidak memiliki kemampuan untuk memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* sehingga bisa disimpulkan bahwa meskipun terdapat perempuan di dewan perusahaan, hal ini tidak cukup untuk mencegah tindakan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Oktarina (2023) dan sejalan dengan laporan *International Finance Corporation* (IFC) yang menemukan adanya kesenjangan signifikan antara tingkat *gender diversity* di Indonesia (18,4%) dengan rata-rata di ASEAN (25,2%).

Dalam lingkungan bisnis sektor *consumer cyclicals* yang kompetitif, peran komisaris independen seringkali difokuskan pada pengawasan terhadap risiko operasional dan pasar yang dapat mengancam stabilitas perusahaan. Meskipun perempuan memiliki potensi untuk membawa perspektif yang berbeda, akan tetapi dalam konteks di mana tekanan untuk mencapai kinerja keuangan jangka pendek sangat tinggi, pengaruh mereka terhadap praktik *tax avoidance* mungkin terbatas.

H2c: *Gender diversity* mampu memoderasi pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*.

Hasil pengujian dengan nilai signifikansi 0.983 menyatakan bahwa tidak terdapat bukti empiris yang cukup untuk menunjukkan kemampuan *gender diversity* dalam memoderasi pengaruh antara komite audit terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari Oktarina (2023) yang berargumen bahwa *gender diversity*

mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* dengan alasan kecenderungan perempuan dalam menghindari risiko yang kemudian dikaitkan dengan upaya mereka untuk menjaga integritas laporan keuangan perusahaan sehingga menghindari tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan perpajakan.

Dalam konteks *corporate governance*, komite audit dalam sektor *consumer cyclicals* seringkali terikat pada mandat untuk memastikan integritas pelaporan keuangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Fokus yang kuat pada aspek-aspek tersebut dapat membatasi ruang lingkup pengawasan terhadap praktik perpajakan yang agresif sehingga adanya *gender diversity* mungkin tidak secara signifikan mengubah prioritas pengawasan dalam konteks industri yang kompetitif.

H2d: Gender diversity mampu memoderasi pengaruh antara kompensasi eksekutif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan hasil pengujian tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi 0.940 sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa *gender diversity* memiliki pengaruh dalam memoderasi kompensasi eksekutif dengan *tax avoidance* sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian Putri & Setiawati (2021) serta Yuiandini & Masripah (2023) yang menyatakan bahwa pemberian kompensasi tahunan tidak mengubah perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, terlepas dari keberadaan direksi wanita. Temuan ini kemudian bertentangan dengan penelitian dari Amri (2017) yang berhasil membuktikan bahwa kompensasi eksekutif dapat menjadi katalisator bagi praktik *tax avoidance* dengan syarat terdapat setidaknya satu direksi perempuan dengan profil risiko tinggi.

Mekanisme kompensasi eksekutif berbasis kinerja, yang lazim dalam sektor *consumer cyclicals*, dapat menciptakan insentif yang kuat bagi para eksekutif untuk mengadopsi praktik-praktik yang meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek, termasuk *tax avoidance*. Orientasi yang kuat pada pencapaian target finansial dapat mengaburkan perbedaan gender dalam pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan. Akibatnya, meskipun terdapat *gender diversity* dalam manajemen, tekanan untuk mencapai kinerja keuangan yang tinggi dapat mendorong baik eksekutif laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam praktik *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penerapan *good corporate governance* tidak berdampak signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Hal ini tercermin dari hasil pengujian dengan proksi ukuran dewan direksi, komisaris independen dan komite audit yang tidak menunjukkan bukti empiris mampu mempengaruhi *tax avoidance*. Tetapi di sisi lain, kompensasi eksekutif menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* sehingga bisa disimpulkan bahwa peningkatan pemberian kompensasi kepada para eksekutif mampu mendorong terjadinya praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Implikasi ini menyiratkan bahwa otoritas pengawas dan pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan pengawasan terhadap kebijakan kompensasi eksekutif sebagai salah satu pendekatan dalam mengendalikan praktik *tax avoidance*. Temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi investor dan analis pasar dalam mengevaluasi potensi risiko *tax avoidance* pada

perusahaan sektor *consumer cyclicals* serta meningkatkan kualitas analisis investasi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih rasional.

Berbeda dengan ekspektasi, temuan penelitian ini tidak menunjukkan adanya peran signifikan dari *gender diversity* dalam memoderasi pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik *tax avoidance* sehingga bisa disimpulkan bahwa kehadiran perempuan dalam tata kelola perusahaan tidak mampu berkontribusi dalam mengurangi praktik *tax avoidance* yang dilakukan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa *gender diversity* dalam kepemimpinan perusahaan, meskipun penting, tidak secara otomatis menjamin penurunan praktik *tax avoidance*. Kualitas keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya dari segi kuantitas, berperan lebih signifikan dalam mendorong tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki cakupan yang terbatas dengan sampel penelitian terdiri dari 44 perusahaan *consumer cyclicals* sehingga membatasi generalisasi temuan penelitian ke seluruh sektor industri di Indonesia. Di dalam penelitian ini hanya mengkaji dari segi proporsi perempuan di posisi dewan perusahaan sehingga untuk penelitian berikutnya direkomendasikan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengaruh karakteristik spesifik perempuan, seperti dari segi latar belakang pendidikan ataupun budaya, terhadap kecenderungan melakukan praktik *tax avoidance*. Kemudian jika menilik dari hasil pengujian koefisien determinasi, terlihat bahwa praktik *tax avoidance* sebagian besar masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, atau dengan kata lain keberadaan *good corporate governance* tidak menyumbang pengaruh yang substansial terhadap *tax avoidance*, sehingga penulis menyarankan untuk mengeksplor faktor-faktor di luar *good corporate governance* seperti *Corporate Social Responsibility*, *financial distress*, koneksi politik ataupun kebijakan deviden perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity pada Dewan, dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 10(2), 163–176. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i2.14991>
- Amri, M. (2017). Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Moderasi Diversifikasi Gender Direksi dan Preferensi Risiko Eksekutif Perusahaan di Indonesia. *JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)*, 9(1), 1–14. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/5253>
- Anggraeni, D. P. W., & Kurnianto, S. (2020). The Effect of Board Size and Female Directors on Tax Avoidance. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(8), 1127–1141. www.ijicc.net
- Asih, S., & Setiawan, D. (2022). Director Experience, Management Compensation and Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 26(1), 23–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.i ss1.art3>
- Budi, P. N. (2019). The Role of Gender Diversity on The Board of Directors and Tax Avoidance. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 3(87), 107–115. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-03.14>

- Chandra, B., & Cintya. (2021). Upaya Praktik Good Corporate Governance dalam Penghindaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(3), 232–247. <https://doi.org/10.21067/jem.v17i3.6016>
- Chandra, M. M., & Saputra, W. A. (2024). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial, Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Advances in Digital Business and Entrepreneurship*, 3(1), 40–54. <http://intropublica.org/index.php/jadbe/article/view/125>
- Chang, M.-L., Huang, D.-F., Ting, C.-C., & Chang, H.-S. (2019). Gender, Political Connection, and Tax Avoidance in China. *Theoretical Economics Letters*, 09(08), 2839–2863. <https://doi.org/10.4236/tel.2019.98178>
- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The Implications of CSR and GCG on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23(2), 195–212. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>
- Dosinta, N. F., Djafar, F., & Yantiana, N. (2022). The Role of Corporate Governance in Corporate Human Development Disclosures. *Journal of Accounting Research, Organization, and Economics*, 5(3), 282–296. [www/http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE](http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAROE)
- Fatimah, H., Anwar, H. K., Nordiansyah, M., & Tambun, S. P. (2017). Pengaruh Intensitas Modal, Kompensasi Eksekutif dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2017*, 170–192. <https://www.semanticscholar.org/paper/PENGARUH-INTENSITAS-MODAL%2C-KOMPENSASI-EKSEKUTIF-DAN-Fatimah-Anwar/68eccb70d377c77dda6ab484ebb58fba514af245>
- Febriansyah, A., & Oktafiani, F. (2021). Penghindaran Pajak yang Dipengaruhi oleh Komite Audit dan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88–100.
- Guska, R. S., & Kaesang, E. J. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (Neraca)*, 2(6), 643–655. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i6.1872>
- Hoseini, M., Gerayli, M. S., & Valiyan, H. (2019). Demographic Characteristics of The Board of Directors' Structure and Tax Avoidance. *International Journal of Social Economics*, 46(2), 199–212. <https://doi.org/10.1108/IJSE-11-2017-0507>
- Hudha, B., & Utomo, D. C. (2021). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Komisaris Independen, Keragaman Gender, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(1), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Indonesia.go.id. (2023). *Praktik Penghindaran Pajak Jadi Isu Serius G20 India*. Indonesia.Go.Id: Portal Informasi Indonesia. <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/7368/praktik-penghindaran-pajak-jadi-isu-serius-g20-india?lang=1>

- Julianty, C. W. (2017). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance* [Skripsi]. Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia.
- Kartikasari, D., Wati, L. N., & Soma, A. (2023). Apakah Kekuatan Keberagaman Gender Dalam Menghindari Pajak Meningkatkan Dengan Koneksi Politik? *Jurnal Keuangan Dan Bisnis*, 21(2), 175–193. <https://doi.org/10.32524/jkb.v21i2.1030>
- Kasih, P. A., Sastrodiharjo, I., & Mukti, A. H. (2023). Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Consumer Cyclical yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi (MUFAKAT)*, 2(3). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- Lestari, H. T., & Ovami, D. C. (2020). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 1–6. <https://journal.fkpt.org/index.php/jtear/article/view/50>
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris pada Perusahaan Tambang dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art7>
- Mustika, I. G., Nurfauziah, T., & Yunita, K. (2023). Determinan Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (JAAKFE UNTAN)*, 12(2), 148–161. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i2.66836>
- Oktarina, Y. (2023). Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi. *Educoretax*, 3(2), 72–88.
- Oktavia. (2020). Independent Corporate Governance Organs Activities and Tax Avoidance Activities: Evidence from Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 24(2), 280–296. <https://doi.org/10.24912/ja.v24i2.697>
- Oktaviani, R. M., Wulandari, S., & Sunarto. (2023). Multinational Corporate Tax Avoidance in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(2), 1–15. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i2.1549>
- Putri, R. N., & Setiawati, E. (2021). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 675–686. <https://prosiding.stie-aas.ac.id/index.php/prosenas/article/view/162>
- Salsabilla, D., Diantimala, Y., Indayani, & Dinaroe. (2024). Board Gender Diversity, CEO Characteristics, and Earning Management in The Banking Sector. *Jurnal Akuntansi*, 28(2), 340–356. <https://doi.org/10.24912/ja.v28i2.2084>
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art1>
- Santoso, T. B. (2014). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan* [Skripsi]. Universitas Diponegoro.

- Vacca, A., Iazzi, A., Vrontis, D., & Fait, M. (2020). The Role of Gender Diversity on Tax Aggressiveness and Corporate Social Responsibility: Evidence from Italian Listed Companies. *Sustainability (Switzerland)*, *12*, 1–14. <https://doi.org/10.3390/su12052007>
- Yuiandini, H., & Masripah. (2023). Kompensasi Manajemen dan Kualitas Audit pada Tax Avoidance: Board Gender Diversity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Pajak Indonesia*, *7*(1), 16–28. <https://doi.org/10.31092/jpi.v7i1.2091>
- Yunita, K., Grania Mustika, I., & Nurfauziah, T. (2022). Determinasi Kesadaran WP EMKM Kota Pontianak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (JAAKFE UNTAN)*, *11*(2), 65. <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v11i2.60329>
- Zhang, X., Husnain, M., Yang, H., Ullah, S., Abbas, J., & Zhang, R. (2022). Corporate Business Strategy and Tax Avoidance Culture: Moderating Role of Gender Diversity in an Emerging Economy. *Frontiers in Psychology*, *13*, 1–11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.827553>
- Zudana, A. E., Tarigan, C. J. A., Hutabarat, R. G. L., & Haikal, A. (2021). Females and Tax Avoidance: Evidence from the Agency Problem Perspective. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *11*(3), 667–678. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i3.17871>